

**SEKURITISASI MIGRAN MUSLIM OLEH PEMERINTAH PRANCIS  
MELALUI UNDANG-UNDANG ANTI SEPARATISME REZIM  
EMMANUEL MACRON**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Andalas*



**Oleh:**

**SYAFHIRA SALSABILLAH**

**1910851006**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Muhammad Yusra, S.IP, MA**

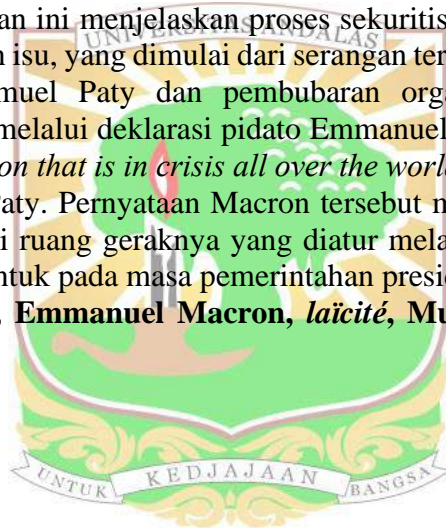
**Maryam Jamilah, S.IP, M.Si**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses sekuritisasi migran Muslim oleh Pemerintah Prancis melalui undang-undang anti separatisme rezim Emmanuel Macron. Isu migran merupakan isu yang paling ramai dibicarakan terutama di negara Prancis yang telah dianggap sebagai rumah bagi 5 juta umat Muslim dan juga negara terbesar bagi umat Muslim di Eropa. Meningkatnya migran Muslim, serta munculnya teror-teror yang dilakukan oleh Migran di Prancis dianggap menyebarkan gerakan separatis. Oleh karena itu, Prancis semakin waspada terhadap keamanan dan perlindungan prinsip negaranya yang sekuler, dikarenakan kehadiran Muslim yang dianggap ekstremisme. Penelitian ini dianalisis menggunakan kerangka konseptual tahapan sekuritisasi oleh Barry Buzan, Waever, dan Jaap de Wilde yaitu tahapan pemunculan isu dan tahapan meyakinkan *audience* menggunakan *speech act*. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif analisis dengan memanfaatkan data sekunder. Penelitian ini menjelaskan proses sekuritisasi melalui dua tahapan, yaitu tahap pemunculan isu, yang dimulai dari serangan teror tahun 2015 di Prancis, dramatisasi kasus Samuel Paty dan pembubaran organisasi CCIF. Tahapan meyakinkan *audience* melalui deklarasi pidato Emmanuel Macron yang menyebut Islam sebagai “*a religion that is in crisis all over the world today*” pada saat kasus penyerangan Samuel Paty. Pernyataan Macron tersebut membuat Muslim merasa disudutkan dan diawasi ruang gerakannya yang diatur melalui undang-undang Anti Separatisme yang dibentuk pada masa pemerintahan presiden Emmanuel Macron.

**Kata Kunci:** Prancis, Emmanuel Macron, *laïcité*, Muslim, sekuritisasi, anti separatisme.



## ABSTRACT

*This study aims to explain the process of securitization of Muslim migrants by the French Government through the anti-separatism law of the Emmanuel Macron regime. The issue of migrants is the most widely discussed issue, especially in France, which has been considered home to 5 million Muslims and also the largest country for Muslims in Europe. The increase in Muslim migrants, as well as the emergence of terror carried out by migrants in France are considered to spread separatist movements. Therefore, France is increasingly vigilant about the security and protection of its secular state principles, due to the presence of Muslims who are considered extremists. This study was analyzed using the conceptual framework of the securitization stages by Barry Buzan, Waever, and Jaap de Wilde, namely the stage of issue emergence and the stage of convincing the audience using speech acts. The research method used is qualitative with a descriptive analysis type of research utilizing secondary data. This study explains the securitization process through two stages, namely the stage of issue emergence, which started from the 2015 terrorist attacks in France, the dramatization of the Samuel Paty case and the dissolution of the CCIF organization. Stages of convincing the audience through Emmanuel Macron's speech declaration that called Islam "a religion that is in crisis all over the world today" during the Samuel Paty attack case. Macron's statement made Muslims feel cornered and their space for movement was monitored which was regulated through the Anti-Separatism Law formed during President Emmanuel Macron's administration.*

**Keywords:** France, Emmanuel Macron, *laïcité*, Muslim, securitization, anti-separatism.

